

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Filipina sebagai negara yang rentan akan bencana dengan letak geografisnya di Cincin Api Pasifik perlu menyiapkan segala upaya untuk mengatasi bencana. Bencana demi bencana seringkali menimpa negara Filipina seperti angin topan, siklon tropis, gempa bumi, banjir, dan lainnya. Rangkaian bencana yang terjadi dari tahun 2016-2020 di Filipina telah memberikan pemahaman penuh akan pentingnya kebijakan, kapasitas, investasi untuk PRB, dan pendanaan. Seluruh upaya PRB telah dilakukan dengan SFDRR sebagai salah satu panduannya.

SFDRR hadir sebagai norma internasional yang memberikan perspektif pendekatan baru kepada negara-negara dunia bahwa dalam melakukan PRB, negara perlu mengatasi resiko bencana terlebih dahulu. Pendekatan ini jelas berbeda dengan HFA yang lebih mementingkan untuk mengatasi saat bencana terjadi. Keempat prioritas di dalam SFDRR menjadi acuan bagi pemerintah Filipina dalam mengukur tindakan apa saja yang harus mereka lakukan dalam mengatasi bencana. Hal ini dapat kita lihat dalam upaya Filipina untuk membuat NDRP dan NDRRMP sebagai rencana untuk mengatasi resiko bencana yang datang mengancam. Dilihat dari sikap Filipina dalam meminimalisir resiko bencana dan senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, dan lainnya memperlihatkan bahwa Filipina telah secara serius melakukan upaya untuk mengatasi resiko bencana.

Sayangnya, upaya pemerintah nasional Filipina ini tidak terdistribusi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa banyak pemerintah daerah yang masih mengeluhkan kapasitas bencana mereka seperti SDM yang kurang memahami resiko bencana, logistik dan peralatan yang kurang, dan lain sebagainya. Terdapat pula pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan isu bencana karena pemerintahnya merasa bahwa daerahnya adalah kawasan yang tidak rentan akan bencana. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Filipina juga dirasa percuma karena banyaknya pemerintah daerah yang abai mengimplementasikan kebijakan tersebut dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan ketangguhannya akan bencana semata-mata untuk mengurangi anggaran yang

harus mereka keluarkan. Kunci dari PRB yang baik menurut teori *human security* salah satunya adalah kolaboratif dan transdisipliner di seluruh cakupan wilayah baik internasional, regional, nasional, wilayah, provinsi, kota/kabupaten, dan *barangay*. Tetapi, prioritas SFDRR seringkali terlihat hanya dipahami oleh pemerintah nasional ataupun lembaga internasional saja tanpa melihat bahwa terdapat beberapa pemerintah daerah yang masih belum menerapkan prioritas SFDRR secara baik.

Kerjasama antar departemen di Filipina baik dalam struktur organisasi NDRRMC, ICS, ataupun koordinasi dari PIHAC dilihat belum terlaksana secara baik. Hal ini disebabkan karena departemen tersebut yang seharusnya berjalan sendiri diharuskan untuk bekerjasama sementara departemen tersebut memiliki fokus utama selain isu bencana. Peneliti juga menemukan bahwa Filipina kesulitan melakukan fungsi monitoring dalam pendampingan bencana dari organisasi internasional. Organisasi internasional penting keberadaannya karena dapat memberikan tim pendukung yang kompeten, peralatan canggih, ataupun donasi tetapi tanpa adanya monitoring dikhawatirkan operasi respons bencana yang dilakukan kurang tepat sasaran. Pendekatan kolaboratif yang digaung-gaungkan oleh *human security* yang seharusnya dapat menciptakan rasa aman dan nyaman untuk masing-masing individu saat terjadi bencana ditakutkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah Filipina karena kurangnya koordinasi ataupun sulitnya fungsi monitoring dalam kerjasama tersebut.

6.2 Saran

Peneliti menyarankan untuk mahasiswa ilmu Hubungan Internasional agar melakukan penelitian mengenai isu bencana karena isu bencana telah menjadi salah satu aspek yang dapat mengancam keamanan nasional maupun internasional. Kita dapat melihat contohnya dalam kasus pandemi Covid-19 yang telah mengganggu keberlangsungan hidup di seluruh negara. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi SFDRR di Filipina. Penelitian tersebut dapat menjadi tinjauan apakah SFDRR telah menjadi panduan yang tepat untuk diterapkan di berbagai negara. Hal tersebut berdasarkan masa

berlaku dari SFDRR sendiri yang akan terus menjadi norma internasional mengenai manajemen bencana hingga tahun 2030.

Peneliti memberikan apresiasi kepada pemerintah Filipina untuk upayanya dalam senantiasa meningkatkan manajemen bencana dan PRB. Tentunya sulit untuk menciptakan rasa aman bagi masing-masing individu di negara yang rentan akan bencana dan pemerintah Filipina telah berusaha sebaik mungkin. Namun, melihat hambatan dan pelaksanaan yang terjadi di Filipina selama tahun 2016-2020 dalam mengatasi bencana dengan panduan norma internasional seperti SFDRR, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk pemangku kebijakan dan organisasi yang fokus akan bencana. Pertama, peneliti melihat perlunya dibentuk Departemen Bencana dalam jajaran kabinet pemerintah di Filipina. Bencana selalu menjadi isu sampingan dan Filipina telah membentuk NDRRMC sebagai badan manajemen bencana. Namun, melihat struktur organisasi yang diisi oleh departemen pemerintah yang menyebabkan seakan-akan berjalan sendiri karena masing-masing departemen memiliki kepentingannya sendiri, rasanya perlu untuk Filipina membentuk departemen khusus untuk bencana karena negaranya yang memang rentan akan bencana. Kedua, Filipina perlu memastikan ketersediaan informasi mengenai bencana mudah diakses dan penelitiannya dapat didukung untuk memberikan pemahaman mendalam akan resiko bencana di Filipina. Selain dapat membantu kinerja pemerintah dan organisasi yang bergerak di bidang bencana, masyarakat juga dapat terbantu dengan akses informasi ini agar dapat melakukan persiapan lebih sebelum terjadinya bencana dan meminimalisir kerugian yang mereka alami. Ketiga, Filipina telah mengatur pengalokasian dana untuk fase persiapan adalah 70% sesuai dalam RA 10121. Tetapi melihat praktek yang terjadi di lapangan, dana yang digunakan lebih banyak dikeluarkan dalam fase respons bencana. Hal ini tentunya menghambat respons efektif dan kepentingan “Build Back Better” karena proses evakuasi dan kerugian yang dialami akan lebih besar daripada jika pendanaan lebih difokuskan untuk fase persiapan. Selanjutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah nasional serta kerjasama internasional perlu diberikan perhatian khusus. Kejelasan koordinasi ini penting untuk memberikan informasi mengenai apa saja yang sebenarnya dibutuhkan saat wilayah terjadi bencana dan apakah kebutuhan para korban telah terpenuhi.